

**LAPORAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
TRIWULAN I TAHUN 2023**



PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA KELAS II

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah disusunnya Laporan Survey Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Triwulan I Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Semarang. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survey Persepsi Anti Korupsi kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survey Persepsi Anti Korupsi dapat menggunakan metode dan teknik survey yang sesuai. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Semarang melaksanakan survey kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Persepsi Anti Korupsi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik sekaligus persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Tim Survey maka disusun Laporan ini yang dimaksudkan untuk memberikan informasi bahwa Pengadilan Negeri Semarang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Semoga hasil survey ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri Semarang dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan pengadilan serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih efektif dan efisien.

Demikian Laporan Survey Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Triwulan I Tahun 2023 ini disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 31 Maret 2023
Ketua Tim,

Ni Made Ari Artini, SH.
NIP. 19840424 201101 2 017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Rencana Kerja Pelaksanaan	4
D. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan	4
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	5
A. Metodologi Survei	5
B. Teknik Pengumpulan Data	5
C. Teknik Analisa Data	5
D. Variabel Pengukuran IPK	5
BAB III PROFIL RESPONDEN	7
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	9
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	17
DAFTAR PUSTAKA	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu antianah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. MAKSUD dan TUJUAN

Survey Persepsi Anti Korupsi ini bertujuan untuk mengukur persepsi korupsi pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Semarang.

Adapun Tujuan Survey Persepsi Anti Korupsi adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran yang obyektif mengenai kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna Pengadilan.
2. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Pimpinan sebagai dasar menentukan tindaklanjut dan upaya perbaikan untuk meningkatkan pelayanan di Pengadilan Negeri Semarang.
3. Mengetahui tingkat kepercayaan publik kepada Pengadilan Negeri Semarang.

C. RENCANA KERJA PELAKSANAAN

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari - 31 Maret 2023 dengan menetapkan target Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,50 (*tiga koma lima puluh*)

D. TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Tahapan yang dilakukan dalam melakukan survey ini adalah:

1. Tim survey menentukan metode survey.
2. Tim survey membuat instrument berupa kuisisioner.
3. Tim survey memperbanyak kuisisioner, menentukan jadwal pelaksanaan survey.
4. Tim survey melakukan survey sesuai jadwal.
5. Kuisisioner yang telah diisi dikumpulkan oleh petugas diserahkan kepada ketua tim survey.
6. Tim survey menganalisa kuisisioner yang sudah terisi.
7. Tim survey menyajikan hasil analisa dalam bentuk deskriptif.
8. Hasil analisa diserahkan kepada MR.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. METODOLOGI SURVEI

Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif yang datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik dan sebagai data pendukung dipakai data kualitatif.

B. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Data pada penelitian ini diambil dengan instrument berupa kuesioner dengan jawaban tertutup dan terbuka.

Sebagai sample pada penelitian ini berjumlah 61 orang responden yang di ambil secara *simple random sampling* terhadap pengguna Pengaditan yang telah mendapatkan pelayanan, terdiri dari:

1. PNS
2. TNI
3. POLRI
4. Swasta
5. Wirausaha
6. Tenaga Kontrak
7. Lainnya

C. TEKNIK ANALISA DATA

Setelah data terkumpul data pada penelitian ini dianalisis dengan analisis statistik deskriptif.

D. VARIABEL PENGUKURAN IPK

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014

Tentang Pedoman Survey Persepsi Anti Korupsi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 10 ruang lingkup antara lain:

1. Manipulasi Peraturan
2. Penyalahgunaan Jabatan
3. Menjual Pengaruh

4. **Transaksi Biaya**
5. **Biaya Tambahan**
6. **Hadiah**
7. **Transparasi Biaya**
8. **Percatoan**
9. **Perbuatan Curang**
10. **Transaksi Rahasia**

BAB III PROFIL RESPONDEN

a. Umur Responden

NO	UMUR	FREKUENSI	(%)
1	17-30	20	32,79
2	31-40	12	19,67
3	41-50	13	21,31
4	51-60	10	16,39
5	61>	6	9,84
JUMLAH		61	100,00

Mayoritas responden ini berumur 17 tahun sampai dengan 30 tahun dengan jumlah 20 orang dari total 61 reponden (32,79%).

b. Jenis Kelamin Responden

NO	JENIS KELAMIN	FREKUENSI	(%)
1	LAKI-LAKI	36	59,02
2	PEREMPUAN	25	40,98
JUMLAH		61	100,00

Mayoritas responden ini berjenis kelamin laki-laki yang berjumlah 36 orang dari total 61 responden (59,02%).

c. Pendidikan Terakhir Responden

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	FREKUENSI	(%)
1	Tidak / Belum Sekolah	0	0,00
2	SD	1	1,64
3	SMP	10	16,39
4	SMU	29	47,54
5	Diploma 1	1	1,64
6	Diploma 2	1	1,64
7	Diploma 3	5	8,20
8	S1	10	16,39
9	S2	4	6,56
10	S3	0	0,00
JUMLAH		61	100,00

Mayoritas Pendidikan Terakhir Responden disini adalah SMU yang berjumlah 29 orang dari total responden 61 orang (47,54%).

d. Pekerjaan Utama Responden

NO	PEKERJAAN	FREKUENSI	(%)
1	PNS	6	9,84
2	TNI	0	0,00
3	POLRI	0	0,00
4	SWASTA	37	60,66
5	WIRSAUSAHA	5	8,20
6	TENAGA KONTRAK	5	8,20
7	LAINNYA	8	13,11
JUMLAH		61	100,00

Mayoritas Pekerjaan Utama Responden adalah Swasta yaitu 37 orang dari total responden 61 orang (60,66%).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Berdasarkan hasil analisis fakta di lapangan di peroleh Survey Persepsi Anti Korupsi Unit Pelayanan sebesar 3,92. Analisis selanjutnya disajikan berdasarkan masing-masing ruang lingkup pelayanan:

1. Indikator Manipulasi Peraturan

Hasil analisis pada ruang lingkup secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini.

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Selalu Sesuai Prosedur	4	61	100,00
2	Sering Sesuai Prosedur	3	0	0,00
3	Jarang Sesuai Prosedur	2	0	0,00
4	Tidak Sesuai Prosedur	1	0	0,00
JUMLAH			61	100,00



Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden (100%) menyatakan pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Indeks Indikator Manipulasi Peraturan adalah 4,00.

2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Hasil analisis pada ruang lingkup secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan	4	61	100,00
2	Petugas Melayani Jarang Meminta Imbalan	3	0	0,00
3	Petugas Melayani Sering Meminta Imbalan	2	0	0,00
4	Petugas Melayani Selalu Meminta Imbalan	1	0	0,00
JUMLAH			61	100,00



Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden (100,00%) menyatakan dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah tidak ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu. Indeks Indikator Penyalahgunaan Jabatan adalah 4,00.

3. Indikator Menjual Pengaruh

Hasil analisis pada Indikator Menjual Pengaruh secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Tidak Ada	4	58	95,08
2	Jarang	3	2	3,28
3	Sering	2	0	0,00
4	Selalu	1	1	1,64
JUMLAH			61	100,00



Tabel dan grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden (95,08%) menyatakan tidak ada dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara. Indeks Indikator Menjual Pengaruh adalah 3,92.

4. Indikator Transparansi Biaya

Hasil analisis pada Indikator Transaksi Biaya secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Selalu	4	57	93,44
2	Sering	3	2	3,28
3	Jarang	2	0	0,00
4	Tidak Pernah	1	2	3,28
JUMLAH			61	100,00



Tabel dan grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden (93,44%) menyatakan selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik

melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan. Indeks Indikator Transparansi Biaya adalah 3,87.

5. Indikator Biaya Tambahan

Hasil analisis pada ruang lingkup Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Selalu	4	58	95,08
2	Sering	3	0	0,00
3	Jarang	2	0	0,00
4	Tidak Pernah	1	3	4,92
JUMLAH			61	100,00

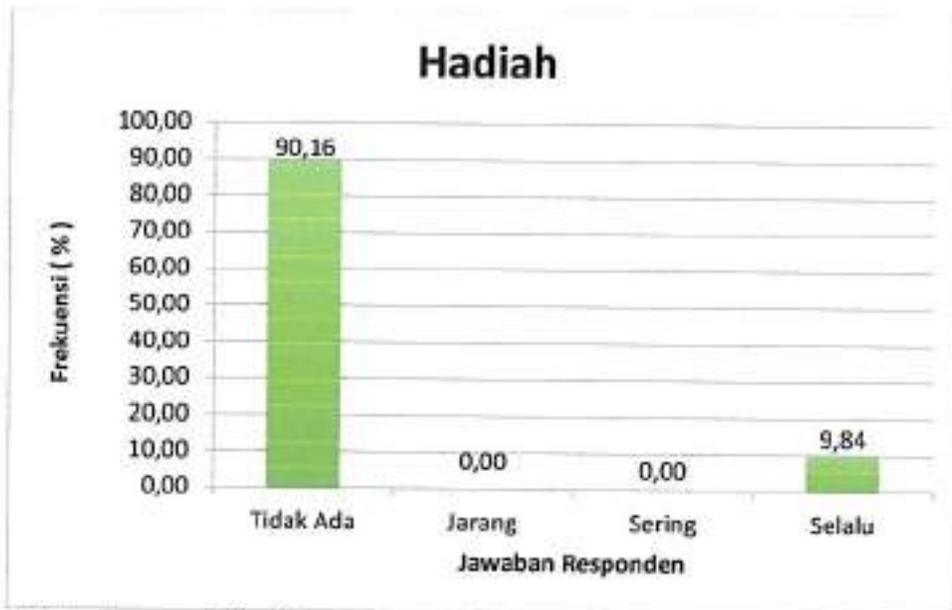


Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden (95,08%) menyatakan di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan. Indeks Indikator Biaya Tambahan adalah 3,85.

6. Indikator Hadiah

Hasil analisis pada Indikator Hadiah secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Tidak Ada	4	55	90,16
2	Jarang	3	0	0,00
3	Sering	2	0	0,00
4	Selalu	1	6	9,84
JUMLAH			61	100,00



Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden (90,16%) menyatakan tidak ada memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta). Indeks Indikator Hadiah adalah 3,70.

7. Indikator Transparansi Pembayaran

Hasil analisis pada ruang lingkup Perilaku Pelaksana Pelayanan secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Selalu	4	59	96,72
2	Sering	3	0	0,00
3	Jarang	2	0	0,00
4	Tidak Pernah	1	2	3,28
JUMLAH			61	100,00

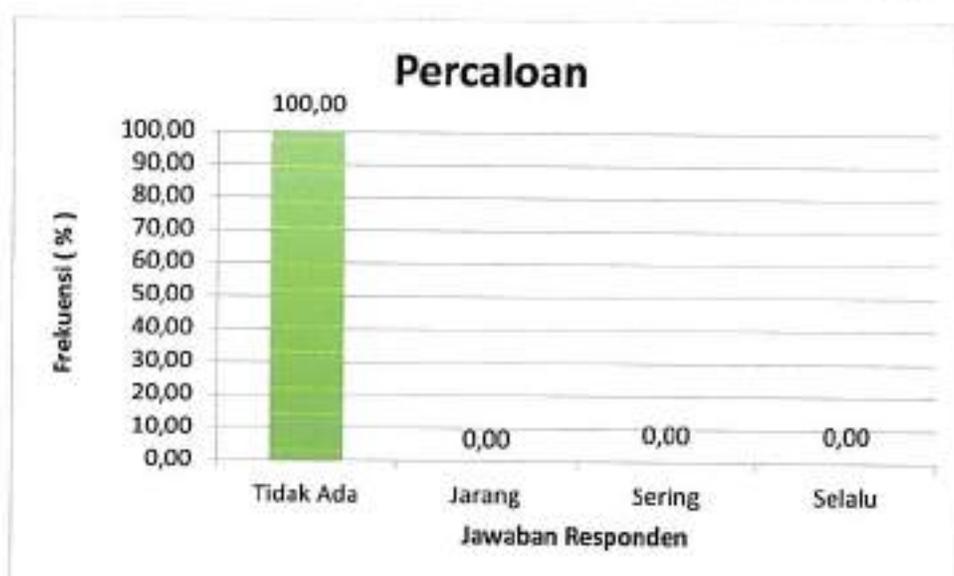


Tabel dan grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden (96,72%) menyatakan selalu menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan. Indeks Indikator Transparansi Pembayaran adalah 3,90.

8. Indikator Percaloan

Hasil analisis pada Indikator Percaloan secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Tidak Ada	4	61	100,00
2	Jarang	3	0	0,00
3	Sering	2	0	0,00
4	Selalu	1	0	0,00
JUMLAH			61	100,00



Tabel dan grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas (100,00%) responden menyatakan tidak ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan. Indeks Indikator Percaloan adalah 4,00.

9. Indikator Perbuatan Curang

Hasil analisis pada ruang lingkup Indikator Perbuatan Curang secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Tidak Ada	4	61	100,00
2	Jarang	3	0	0,00
3	Sering	2	0	0,00
4	Selalu	1	0	0,00
JUMLAH			61	100,00



Tabel dan grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas (100,00%) responden menyatakan tidak ada melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan. Indeks Indikator Perbuatan Curang adalah 4,00.

10. Indikator Transaksi Rahasia

Hasil analisis pada ruang lingkup Indikator Transaksi Rahasia secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Tidak Ada	4	60	98,36
2	Jarang	3	0	0,00
3	Sering	2	0	0,00
4	Selalu	1	1	1,64
JUMLAH			61	100,00



Tabel dan grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas (98,36%) responden menyatakan tidak ada mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan. Indeks Indikator Transaksi Rahasia adalah 3,95.

Dalam survey Persepsi Anti Korupsi Pengadilan ini terdapat beberapa responden yang memberikan saran dan masukan sebagai berikut :

- 1 Baik
- 2 Ramah
- 3 Baik. Agar Lebih Ditingkatkan Lagi
- 4 Bagus
- 5 Bagus
- 6 Baik
- 7 Baik
- 8 Sangat Cepat Dan Berintegritas.
- 9 Baik, Pelayanan Cepat Dan Ramah
- 10 Selalu Ramah Dan Membrikan Pelayanan Yang Terbaik
- 11 Tetap Pertahankan
- 12 The Best Instansi Peradilan.....
- 13 Baik Dan Sopan
- 14 Baik Dan Pelayanannya Ramah
- 15 Ramah Sekali
- 16 Pelayanan Sangat Baik Dan Bersih. Perlu Dicontoh PN Lain.
- 17 Layanan Cepat Dan Baik
- 18 Pelayanan Petuga Sudah Bagus Dan Cepat
- 19 Pelayanan Sudah Sangat Bagus Dan Cepat
- 20 Pelayanan Yang Saya Dapat Sudah Sangat Baik Dan Cepat
- 21 Baik
- 22 Baik
- 23 Pelayana Disisi Sangat Bagus Baik Ramah
- 24 Sangat Baik
- 25 Cepat Dan Baik
- 26 Saya Mengajukan Permohonan Warmaking Dan Sudah Dilayani Dengan Baik
- 27 Pelayanan Sudah Baik, Petugas Ramah Dan Sangat Membantu
- 28 Pelayanan Sangat Memuaskan
- 29 Pelayanan Sudah Baik
- 30 Pelayanan Sangat Ramah
- 31 Sudah Baik
- 32 Pelayanan Yang Diberikan Sudah Bagus
- 33 Pelayanan Sudah Bagus
- 34 Layanan Sudah Bagus, Pertahankan
- 35 Dipertahankan
- 36 Baik. Agar Tetap Dipertahankan
- 37 Pelayanan Cukup Baik Bahkan Baik, Mulai Mudahan Pengadilan Negeri Semarang Dapat Lebih Meningkatkan Kualitas
- 38 Lebih Ditingkatkan Untuk Memperoleh Predikat Yang Lebih Baik
- 39 Baik
- 40 Baik
- 41 Sudah Bagus
- 42 Layanan Yang Diberikan Sudah Sangat Baik. Pertahankan Selalu
- 43 Pelayanan Sudah Bagus. Pertahankan.
- 44 Pelayanan Dan penyampaian Informasi Yag Ditagikan Dilayani Dengan Sepenuhhati
- 45 Baik, Perlu Di Tingkatkan
- 46 Cukup Baik
- 47 Baik
- 48 Pelayan Sudah Diberikan Secara Maksimal Dan Sesuai Dengan Prosedur Yang Berlaku
- 49 Baik, Ramah
- 50 Baik

- 51 Pelayan Yg Sangat Baik
- 52 Tegakkan Keadilan Selurus - Lurusnya
- 53 Melayani Yang Lebih Baik
- 54 Saya Sangat Puas Dengan Pelayanan Yang Diberikan Oleh Petugas, Semoga Dapat Dipertahankan
- 55 Pelayanan Yang Diberikan Oleh Petugas Sudah Sangat Bagus
- 56 Layanan Sudah Bagus, Tingkatkan
- 57 Sudah Bagus, Pertahankan
- 58 Pelayanan Lebih Ditingkatkan
- 59 Sudah Baik, Tingkatkan
- 60 Pertahankan
- 61 Pelayanan Yang Diberikan Sudah Bagus

Nilai Rata-Rata Per Unsur Indikator

No	Unsur Korupsi	Nilai Rata-rata Per Unsur
U1	Manipulasi Peraturan	4,00
U2	Penyalahgunaan Jabatan	4,00
U3	Menjual Pengaruh	3,92
U4	Transparansi Biaya	3,87
U5	Biaya Tambahan	3,85
U6	Hadiah	3,70
U7	Transparansi Pembayaran	3,90
U8	Percaloon	4,00
U9	Perbuatan Curang	4,00
U10	Transaksi Rahasia	3,95
Indeks Persepsi Anti Korupsi		3,92

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN DAN SARAN

Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Semarang Triwulan I tahun 2023 adalah 3,92. Hal ini mencerminkan citra yang baik dari masyarakat dan memberikan optimisme semakin meningkatnya kepercayaan publik terhadap Pengadilan Negeri Semarang.

B. SARAN

Upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan harus pula diimbangi dengan menjaga integritas yang tinggi dari segenap aparatur Pengadilan Negeri Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Prof.drs.Sutrisno Hadi, MA. Statistik Jilid 2. Penerbit ANDI. Yogyakarta. 1977
2. Prof.drs.Sutrisno Hadi, MA. Statistik Jilid 3. Penerbit ANDI. Yogyakarta. 1977
3. Drs.Ridwan. M.B.A. Dasar – dasar Statistik. Penerbit Alfa Beta. Semarang. 2008
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Persepsi Korupsi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.